

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

Abdurrahman Riduan Syahrani, 1978, *Hukum dan Peradilan*. Alumni, Bandung.

Abu Fida' abdur rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta.

Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief Budiman, 1993, *Posisi Tawar Menawar Rakyat Dalam Hak Asasi Manusia*, Jawa Pos, Surabaya.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Evi Hartati, 2006, *Tindak Pidana Korupsi cetakan kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* PT  
*Gramedia Pustaka Utama*.

Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia. Jakarta.

Gurnal Myrdal, 1968, *Asia Drama, Volume II*, New York. Pantheon.

H.M.A Kuffal, 2004, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang.

IGN.Ridwan Widya dharma, 2010, *.Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Miriam Budiarto, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit.PT.Gramedia Jakarta

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Mgister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univesrsitas sebelas maret, Surakarta.

Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta.

Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Sastra Djatmika, 1964, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Djembatan, Jakarta.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sri Hartini dkk, 2010, *Hukum Kepegawaian di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

S. Tjondronegoro, 1980, *Melihat fungsi organisasi untuk melindungi kepentingan petani tentang tanah*, Kompas, Jakarta.

W.G. Runciman, 1972, *The three Dimension of social Inequality*, dalam Andree Beteille, Penguin Books.

Wijowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

W,J,S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang – undangan**

Undang- undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun1945

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

### **C. Website**

<https://m.detik.com/fina>, *Ini dia Tempat-tempat rawan Korupsi oleh PNS*, Selasa 6 Des 2011, diakses Selasa 3 Juli 2018, pukul 15.30

Ejurnal.uin- suska.ac.id. Anggun Lestari Suryamion, *Perlindungan Hukum Prefentif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, diakses Jumat 03 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB

<https://www.researchgate.net>. 2015. Konsep Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap penata Laksana rumah tangga Indonesia, diakses pada hari Kamis 16 Agustus 2018. 16.30 WIB

<https://m.detik.com/fina>, *Ini dia Tempat-tempat rawan Korupsi oleh PNS*, Selasa 6 Des 2011, diakses Selasa 3 Juli 2018, pukul 15.30

### **D. Sumber Lainnya**

Miko Kamal, *disampaikan pada Konfrensi Nasional Advokasi Muslim, diselenggarakan di Jakarta 17 September 2017 oleh Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Koalisi Advokad Penjaga Islam*

Satjipto Raharjo, 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*. :Jurnal Masalah Hukum.

Hasil wawancara dengan Yaswirno Selaku Kepala Bagian Hukum di Kesekretariatan Pemerintah Daerah Kabupaten dharmasraya, pada hari senin, 6 Agustus 2018. Pukul 10.00 WIB.

Jdih.dharmasrayakab.go.id bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, diakses pada 8 Agustus 2018, Pukul 14.00 WIB

Hasil wawancara dengan Yaswirno Selaku Kepala Bagian Hukum di Kesekretariatan Pemerintah Daerah Kabupaten dharmasraya, tanggal 8 Agustus 2018. Pukul 10.00 WIB

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung Tentang Pendampingan, Pertimbangan dan Penulisan Hukum melalui TP4D. 2018 hlm. 2-4

Jdih.bssn. go.id. *Perlindungan dan Bantuan Hukum Aparatur Sipil Negara*, diakses 17 Agustus 2018, Pukul 19.00. WIB.

Bersumber dari kusioner yang disebarkan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya. waktu 15 -25 Juli 2018.

Jdih.dharmasrayakab.go.id/profil. tupoksi bagian hukum, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, pukul 17.00 WIB